

TAJUK RENCANA

Wisata Aman dalam Libur Nataru

LIBURAN Natal dan Tahun baru 2025, sudah mulai terasa, khususnya di DIY. Selama libur diperkirakan 3.371.901 wisatawan akan mengunjungi Yogyakarta. Proyeksi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata DIY dan mencakup total pergerakan orang yang diprediksi mencapai 9 juta selama periode liburan tersebut.

Liburan nataru diprediksi akan membawa lonjakan jumlah wisatawan, dengan estimasi mencapai 40 juta pengunjung di seluruh Indonesia. Lonjakan ini meningkatkan risiko kecelakaan dan insiden keamanan, sehingga pengelola tempat wisata perlu memastikan semua fasilitas dan wahana dalam kondisi aman.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.164.440 wisatawan diharapkan akan menginap dan memanfaatkan akomodasi di DIY, dengan objek wisata alam menjadi destinasi utama yang diminati. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga dipengaruhi oleh pembukaan jalur tol baru yang mempermudah akses ke wilayah tersebut. Apalagi cuaca ekstrem akhir-akhir ini, harus juga menjadi perhatian utama.

Sebagai persiapan, Polda DIY telah menyiapkan 20 pos terpadu untuk pengamanan dan pelayanan, terutama di titik-titik rawan kemacetan yang sering terjadi saat liburan.

Keamanan wisatawan selama liburan sangat penting untuk memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan. Mengapa objek wisata harus siap mengamankan wisatawan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah dan pengelola tempat wisata bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada wisatawan. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serta kerugian reputasi bagi destinasi wisata.

Sejarah menunjukkan bahwa tragedi di tempat wisata, seperti insiden jembatan kaca di Banyumas, dapat terjadi jika langkah-langkah keamanan tidak diambil secara proaktif. Oleh karena itu, pengelola harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas dan

memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik sebelum periode liburan.

Keamanan yang terjamin akan meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung. Wisatawan yang merasa aman lebih cenderung untuk menikmati pengalaman mereka tanpa kekhawatiran berlebihan tentang potensi bahaya. Ini juga berkontribusi pada reputasi positif destinasi, yang penting untuk keberlanjutan industri pariwisata.

Melalui sistem informasi pariwisata nasional, data mengenai pergerakan wisatawan, tingkat okupansi hotel, dan aktivitas pelayaran dapat dipantau secara real-time untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat.

Pengelola tempat wisata harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas, termasuk pelatihan bagi staf tentang bagaimana menangani situasi darurat. Ini mencakup prosedur evakuasi dan komunikasi yang efektif dengan pengunjung. Kesiapan ini tidak hanya melindungi wisatawan tetapi juga memberikan rasa aman yang lebih besar.

Ada kebutuhan mendesak untuk sinergi antara pemerintah, dinas pariwisata, dan pengelola tempat wisata dalam memastikan keamanan. Audit lokasi wisata dan pemeriksaan rutin dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko sebelum liburan dimulai.

Dengan langkah-langkah ini, objek wisata dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua pengunjung selama liburan nataru. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan, berbagai langkah strategis dan kolaboratif telah direncanakan oleh pemerintah dan pihak terkait.

Pembentukan Tim Satgas Nataru ini bertugas untuk memitigasi potensi krisis, terutama terkait cuaca ekstrem yang mungkin terjadi selama periode Nataru. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas lokal, dinas pariwisata, dan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah perlu terus melakukan inspeksi terhadap sarana transportasi, terutama di jalur-jalur kritis seperti pelabuhan dan jalan raya, untuk memastikan keselamatan perjalanan selama Nataru. (***)

Pemilihan Kepala Daerah

WACANA Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dipersoalkan, bahkan Presiden Prabowo secara implisit menginginkan agar Pilkada dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada melalui DPRD sesungguhnya bukan isu baru. Pasca reformasi sampai tahun 2005 Indonesia menerapkan Pilkada melalui DPRD. Baru setelah tahun 2005, melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang saat ini menjadi Pilkada serentak dan langsung. Tahun 2014 lalu, DPR-RI dan Pemerintah pernah menyetujui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun hanya sehari setelahnya, UU ini dibatalkan oleh Presiden SBY melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Kalau ditelisik lebih dalam, wacana mengembalikan Pilkada oleh DPRD bukan tanpa alasan sama sekali. Pertama, secara sederhana penyelenggaraan Pilkada langsung membutuhkan *cost* atau biaya yang jauh lebih tinggi. Mulai dari perعتakan kertas suara, distribusi kertas suara, pembentukan TPS, akomodasi panitia pemilihan dan pengawas, gaji panitia dari level kecamatan, desa, hingga TPS, dan masih banyak kebutuhan lain yang sangat besar. Kedua, fenomena calon tunggal

yang melawan kotak kosong semakin menguat setiap kali penyelenggaraan Pilkada. Harus dipahami, Pilkada secara langsung sedikit banyak berkontribusi atas kondisi ini, karena biaya politik yang tinggi menyebabkan partai politik enggan mengusung calon di daerah tertentu. Ketiga, apa yang cukup mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung adalah menguatnya segregasi sosial, terutama beberapa daerah yang masih menggunakan dan memanfaatkan sentimen religius dan suku dalam mendulang elektabilitas. Keempat, berbanding lurus dengan itu, adalah tingkat literasi masyarakat, terutama literasi politik yang masih lemah. Jika kita petakan, atau setidaknya telusuri melalui kajian Aspinal 2019 lalu, mayoritas masyarakat sama sekali tidak melihat rekam je-

Despan Heryansyah

jak calon dalam menentukan pilihan, namun digerakkan oleh *money politics* tim sukses. Artinya, pemilih tidak memilih berdasarkan hati nuraninya, dan calon tidak perlu menunjukkan rekam jejak dan prestasinya, semua dikendalikan oleh politik uang. Pemilu tahun 2024 ini, tampaknya keempat komponen ini bukan saja masih terjadi, tapi justru semakin memburuk.



KR-JOKO SANTOSO

Wacana Pemilihan Tidak Langsung

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau tidak langsung, sebetulnya bukanlah pilihan ideal. Sebagaimana pengalaman masa lalu Indonesia, Pilkada oleh DPRD sangat rentan dikooptasi atau dibajak oleh kepentingan politik penguasa. Dengan jumlah yang lebih sedikit, tentu akan lebih mudah mengendalikan anggota DPRD dari pada masyarakat luas. Maka, adalah rahasia umum jika *money politics* saat itu juga beredar, namun hanya di kalangan anggota DPRD dan partai politik. Belum lagi, sekalipun dalam konstitusi (UUD N RI Tahun 1945) hanya menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, artinya tidak menyebut langsung maupun tidak langsung, namun perjalanan putusan MK secara konstitusional telah sampai pada peny-

atuatapan rezim Pilkada ke dalam pemilihan umum, sehingga juga diselenggarakan langsung oleh rakyat.

Belum lagi, kalau kita membaca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD didesain dengan sangat lemah. DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, bukan lembaga legislatif di daerah. Artinya, sangat tidak konsisten dengan desain awal jika Pilkada diserahkan kepada DPRD. Selain itu, mengembalikan Pilkada kepada DPRD pasti akan berujung pada penolakan rakyat, demo akan terjadi di mana-mana, belum lagi *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa wacana mengembalikan Pilkada oleh DPRD ini jangan dibaca semata-mata hanya pilihan politik praktis elite. Kita tahu betul, Pilkada langsung saat ini melahirkan berbagai persoalan serius yang memperkuat segregasi sosial. Isu mengembalikan Pilkada oleh DPRD harus menjadi alarm kuat, bahwa ada masalah pelik dengan Pilkada langsung saat ini. Harus ada solusi agar sentimen identitas tidak lagi digunakan, *money politics* ditekan, politisasi lembaga negara (ASN, TNI, dan Polri) dihentikan, dan yang terutama adalah melembagakan literasi politik kepada seluruh masyarakat. Mengubah desain Pilkada bukanlah solusi, sebagaimana pengalaman dan perjalanan panjang Republik ini. (*)

Despan Heryansyah, Dosen dan Peneliti PSHK Fakultas Hukum UII.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MS.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Haso Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandaryk23@yahoo.com, iklandaryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

MENYAMBUT PELANTIKAN PB PMII 2024-2027

Reimajinasi PMII Era Baru

PENGURUS Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2024-2027 hasil kongres XXI Palembang dengan Ketua Umum Muhammad Shofiyullah Cokro, dan ketua KOPRI PB PMII, Wulansari, akan dikukuhkan pada Rabu 18 Desember 2024 ini di Masjid Istiqlal Jakarta. Acara pengukuhan bertema 'PMII Era Baru Menuju Indonesia Maju' dijadwalkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Ketua Majelis Pembina PB PMII dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dan alumni PMII Nasaruddin Umar yang juga Menteri Agama RI.

Tema iPMII Era Baru Menuju Indonesia Maju, menunjukkan kilas balik kesejarahan PMII yang kuat, sekaligus kesadaran tantangan masa depan yang membutuhkan sumber daya yang mumpuni. Dalam konteks kesejarahan, PMII yang lahir pada 17 April 1960, begitu deklarasi langsung aktif bahkan menjadi inisiator forum pemuda internasional, seperti Konferensi Forum Pemuda Sedunia (*Constituent Meeting for the Youth Forum*) di Moskow, 1960-1961; inisiator lahirnya biro mahasiswa dalam Organisasi Islam Asia-Afrika (OIAA) sebagai tindak lanjut Konferensi Asia Afrika, 1965; ASEAN Youth Leaders Forum; Asia Pacific Interfaith Youth Meeting; ASEAN Plus 8 Youth Assembly; Youth 20 (Y20) Group of Twenty; dan ASEAN Youth Interfaith Camp. Selain itu PMII secara organisatori juga telah menyebar di dunia melalui Pengurus Cabang Internasional (PCI) PMII, misalnya di Jerman, Maroko, Tiongkok, Taiwan, Mesir, Turki, dan Korea. PCI PMII ini semakin menguatkan PMII yang ada di Indonesia yang saat ini memiliki 25 Koordinator Cabang, 231 cabang, 1.664 komisariat, dan 5.115 Rayon.

PMII merupakan organisasi paling strategis dalam melahirkan ilmuwan, intelektual, dan pemimpin masa depan NU dan Indonesia dalam berbagai tingkatannya. Pemimpin NU dari anak ranting, ranting, majelis wakil cabang, cabang, wilayah, dan PBNU mayoritas alumni PMII. Pemimpin negara dari pusat hingga bawah juga banyak alum-

Najma Alya Jasmine

ni PMII.

Sebelum di PMII umumnya ikut kaderisasi di IPNU (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Setelah berproses PMII, umumnya alumni berkhidmah di Ansor, Fatayat, Muslimat, lembaga dan banom NU lainnya, di berbagai tingkatan dari yang terbawah langsung hidup sehari-hari di masyarakat sampai tingkat pusat. Demikian pula sayap politik anak NU, PKB, juga dihidupi dan digerakkan oleh para alumni PMII. Demikian pula para teknokrat dan politisi dari NU yang ada di berbagai institusi dan partai, adalah alumni PMII. Para ilmuwan dan intelektual NU dalam berbagai bidang keilmuan dan kepakaran di kampus manapun, mayoritas kader PMII.

Telusuran sejarah di atas, tampak jelas bahwa PMII merupakan pemasok kader, pemimpin, ilmuwan, intelektual, teknokrat terbaik dan handal di NU. Semua kader PMII berkhidmah untuk kemajemukan Indonesia, dan kemanusiaan semesta. Namun demikian, masih banyak sektor esensial dan strategis baik untuk kemaslahatan NU, Indonesia, dan dunia yang belum dimiliki PMII.

Nilah tantangan nyata 'PMII Era Baru Menuju Indonesia Maju'. Maka PMII harus menjangkau kader di berbagai sektor keilmuan dan kampus-kampus yang ada di daerah, negeri-swasta, dan di pusat-pusat pendidikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Misalnya, di Jakarta PMII harus semakin besar di UIN, UI, dan UNJ; di Yogyakarta PMII perlu membesar di UIN, UNY, UGM, ISI, dan UII. Di Surabaya PMII harus besar di UIN, UNESA, dan UNAIR; di Malang PMII harus lebih besar

lagi di UIN, UB, UNISMA; PMII harus besar di semua perguruan tinggi yang dimiliki NU dan komunitas NU. Besar dari segi kuantitatif kadernya, dan menyebar dari sisi bidang keilmuannya, sehingga begitu NU, negara, dan berbagai pihak butuh ahli atau pakar bidang apapun, PMII siap.

Itulah yang saya imajinasikan 'PMII Era Baru Menuju Indonesia Baru'. PMII yang mengakar keislaman *ahlus sunnah wal jama'ah an-nahdliyyah*-nya, dan teguh dalam memperjuangkan kehidupan yang *musawa* (egaliter), *mu'asarah bil mairuf* (harmonis), dan *'adalah* (berkeadilan). Dalam doktrin PMII menjadi berilmu-amaliah, bermal-ilmiah, bertaqwa-ilahiyah. Kesemuanya itu hanya dapat terlaksana bila selalu berpegang pada doktrin kaidah; *al-muhafadhatu 'alal qadimish shohih wal ahdu biljadidil ashlah* (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik). Selamat berkhidmah sahabat sahabati PB PMII dan Kopri PB PMII 2024-2027. Salam pergerakan! Tangan terkepal dan maju ke muka! (*)

Najma Alya Jasmine, Mahasiswa Departemen Sosiologi, Ketua PMII UGM, dan mantan Reporter Kaca Kedaulatan Rakyat.

Pojok KR

Diprediksi 3,3 juta wisatawan akan masuk DIY dalam libur Nataru.
- Suasana sudah terasa, harus diciptakan rasa aman. ***

Pupuk palsu rugikan petani Rp 3. 2 T.
- Usut tuntas. ***

Hamparan sampah 'hiasi' Pantai Selatan.
- Jangan sampai jadi suguhan wisatawan.

Berita